

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Auditor Internal Pemerintah Mengenai Efektivitas Red Flags dalam Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

Factors Influencing Government Internal Auditor Perception Toward Red Flags Effectiveness for Fraud Detection on Procurement of Goods And Services

Wirda Paulus dan Sri Murni

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret
wirdapaulus@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the perception of internal government auditors about the effectiveness of red flags in detecting fraud on procurement of goods and services. It also aims to examine the influence of respondents demographic factors such as gender, auditor tenure, position, training / fraud training and CFE certification on the auditor's perception. This study uses quantitative methods by distributing questionnaires to internal government auditors at BPKP. The study was conducted with descriptive statistical analysis and multiple linear regression model by using SPSS version 20. The results of this study indicate that the first most effectiveness red flags for detecting fraud on procurement of goods and services is "volume of goods or construction is not the same as that required in the technical specification". Other results shows that gender, auditor tenure, and position do not have influence on auditor perception about effectiveness of red flags while training fraud and CFE certification have influence.

Keyword: auditor, fraud, demographic factor, red flags, procurement

PENDAHULUAN

Kecurangan atau *fraud* merupakan suatu tindakan ilegal yang merugikan pihak lain yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun untuk organisasi. *The Institute of Internal Auditor mendefinisikan fraud sebagai* sekumpulan tindakan yang melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja.

Saat ini masyarakat disugahi berbagai kecurangan baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Kajian "Tren Penanganan Kasus Korupsi" yang dirilis oleh *Indonesian Corruption Watch* Tahun 2016 menunjukkan bahwa nilai kerugian negara dari perkara korupsi yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) selama tahun 2016 berkisar Rp1,45 triliun dari 482 kasus korupsi. Sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) menempati peringkat teratas yang sangat rentan dikorupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat hampir 80 persen tindak pidana yang ditangani terjadi dalam proses pengadaan (<https://indonesiana.tempo.co>). Hasil kajian yang ICW lakukan menemukan bahwa hingga 2016 pengadaan secara nasional belum sepenuhnya menggunakan sistem elektronik. Setidaknya baru 38,4 % pengadaan yang menggunakan sistem elektronik. Hal tersebut memperbesar peluang bagi koruptor meraup banyak keuntungan dari sektor PBJ. Hal ini terlihat dalam kajian ICW tahun 2016 bahwa terdapat 195 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 680 miliar. Salah satu contoh kasus korupsi terkait pengadaan barang dan

jasa yang sangat menyita perhatian publik saat ini adalah korupsi KTP elektronik yang kemudian menyebabkan kerugian negara sekitar 2,3 triliun.

Melihat berbagai fenomena yang ada, masyarakat kemudian mempertanyakan makna sesungguhnya dari opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang dipredikatkan pada suatu instansi maupun lembaga karena meskipun meraih WTP ternyata tetap banyak permasalahan *fraud* yang muncul. Menanggapi hal tersebut BPK kemudian menyampaikan bahwa opini WTP bukanlah jaminan suatu instansi bebas dari korupsi namun BPK tetap wajib mengungkapkan apabila ditemukan kejanggalan atau kecurangan baik yang berpengaruh ataupun tidak terhadap opini atas laporan keuangan (BPK, 2011). Publik menaruh harapan pada auditor baik eksternal maupun internal pemerintah untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan pemerintah yang dibuat adalah relevan dan dapat dipercaya. Jika ternyata ada oknum pelaku *fraud* yang tidak bisa terdeteksi oleh auditor, maka publik akan menempatkan kesalahan pada auditor karena dinilai gagal mendeteksi kecurangan (Rahman, 2015).

Dikutip dari <https://acch.kpk.go.id>, KPK mengidentifikasi bahwa salah satu akar penyebab terjadinya korupsi dalam pengadaan barang/jasa adalah belum efektifnya aspek pengawasan internal dari aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dimana pelaksanaan audit yang dilakukan masih cenderung bersifat reaktif dan belum bersifat proaktif. Upaya APIP yang bersifat preventif dan efektif masih belum maksimal. Hal ini bisa kita lihat dari fakta bahwa banyak pelanggaran atas pengadaan barang dan jasa baru diketahui setelah terjadi serta adanya kasus tindak pidana yang baru diketahui setelah pelaksanaan audit oleh auditor eksternal pemerintah (BPK).

Melihat fenomena tersebut tentunya dibutuhkan suatu cara yang efektif agar auditor mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Herda Helmijaya selaku penyelidik KPK yang menyampaikan bahwa menyingkap suatu kecurangan tidak mudah meskipun kadang secara kasat mata gejala seseorang bertindak curang bisa terlihat. Salah satu yang juga menjadi kendala pada saat pemeriksaan oleh auditor misalnya keterbatasan waktu sehingga dibutuhkan analisis dan metode yang tepat dan efisien serta pengamatan yang jeli untuk dapat mengungkapkan *fraud*. Cahya Harefa Plh. Direktur Gratifikasi KPK (2018) menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan auditor harus mengasah kemampuan melakukan upaya preventif dan mendeteksi *fraud* secara dini. Melihat makin banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia para fungsional auditor harus merumuskan, menyusun, serta menyempurnakan suatu prosedur kerja dalam mendeteksi kecurangan.

Utomo (2014) menyarankan satu cara untuk mengurangi *fraud* adalah dengan meningkatkan kualitas pengujian yang dilakukan oleh auditor. Auditor diharapkan menggunakan prosedur audit yang lebih efektif dan obyektif serta standar terkait untuk meningkatkan efektivitas dalam audit. Kombinasi berbagai teknik audit dengan dukungan adanya *peer review* tentunya bisa memampukan auditor mendeteksi adanya kecurangan. Berbagai alasan di atas memberi penegasan bahwa auditor memerlukan indikator atau tanda (*red flag*) agar memfokuskan kinerja saat melakukan penaksiran risiko *fraud*. *Red flags* merupakan *early warning system* sehingga dapat mengurangi risiko tidak terdeteksinya kecurangan oleh auditor. Menurut DiNapoli (2010) *red flag* merupakan suatu keadaan ataupun kondisi yang tidak biasa terjadi dan berbeda dari aktivitas normal.

Statement of Auditing Standard (SAS) no.99 telah diungkapkan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit dalam rangka

memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan terbebas dari kesalahan material baik yang disebabkan oleh *error* maupun *fraud* serta mempertimbangkan *risk factor* atau yang dikenal dengan *red flags*. Standar ini telah merangkum 42 *risk factor* yang dapat digunakan auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan yang kemudian diadopsi dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Dalam sektor pemerintahan sendiri, BPK merangkum *red flags* dalam pengadaan barang dan jasa yang tertuang dalam *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9/K/IXIII.2/10/2009*, namun dalam standar audit tersebut belum memberikan petunjuk atau pemahaman secara detail mana *red flags* yang paling efektif untuk mendeteksi *fraud* sehingga memungkinkan adanya persepsi yang berbeda dari auditor dalam menilai tingkat efektivitas *red flags* tersebut .

Perbedaan persepsi dalam menilai *red flags* menimbulkan hasil penelitian mengenai efektivitas *red flags* yang berbeda-beda. Perbedaan persepsi dapat diakibatkan perbedaan karakteristik pribadi (Robbins dan Judge,2009). Hasil penelitian Smith et al (2005) menemukan bahwa secara umum faktor demografis auditor tidak berpengaruh terhadap persepsi auditor mengenai efektivitas *red flags*. Utomo (2014) menemukan secara general tidak ada perbedaan persepsi auditor yang memiliki perbedaan faktor demografis mengenai efektivitas *red flags*. Moyes dan Baker (2009) yang menemukan bahwa gender, masa kerja, serta pendidikan berpengaruh terhadap persepsi auditor mengenai efektivitas *red flags* sementara posisi pekerjaan tidak berpengaruh. Sejalan dengan Moyes, Hegazy dan Kassem (2012) juga menemukan adanya pengaruh masa kerja terhadap persepsi auditor mengenai efektivitas *red flags*. Sedangkan Rustiarini (2014) menemukan bahwa gender, posisi pekerjaan, masa kerja tidak berpengaruh terhadap persepsi auditor mengenai efektivitas *red flags*.

Adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya serta masih sedikitnya riset yang menguji topik penelitian ini di lingkup sektor publik, sehingga menjadi atensi tersendiri bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam. Penelitian ini mengacu pada penelitian Rustiarini (2014) yang menguji persepsi atas tingkat efektivitas *red flags* dengan melakukan survey terhadap auditor dengan menggunakan instrument *red flags* yang diadopsi dari SAS No. 99. Yang membedakan dengan penelitian tersebut yaitu objek di penelitian ini adalah auditor internal pemerintah yaitu auditor BPKP serta menguji faktor demografis menggunakan variabel gender, sertifikasi CFE, masa kerja, jabatan, dan pelatihan/diklat *frauds* serta instrument *red flags* yang digunakan adalah 36 *red flags* dalam pengadaan barang/jasa yang diadopsi dari Keputusan BPK RI tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas Pengadaan Barang dan Jasa dalam Utomo (2014).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berpendapat bahwa penelitian mengidentifikasi efektivitas *red flags* pengadaan barang dan jasa penting dilakukan karena pemahaman yang tepat mengenai *red flags* ini akan membantu auditor merencanakan serta melaksanakan audit sehingga diperoleh keyakinan dan hasil audit yang berkualitas serta mengefisienkan jangka waktu pemeriksaan dan juga dapat membantu dalam memilih personil auditor yang tepat untuk diterjunkan ke lapangan.

LANDASAN TEORI

Teori Persepsi

Teori ini termasuk dalam teori psikologis perilaku yang menurut Robbins (2009) proses dimana individu menginterpretasikan kesan sensoris mereka untuk memberi arti bagi lingkungan dimana mereka berada. Namun, apa yang diterima seseorang dapat

berbeda dari realitas objektif. Pada kenyataannya, setiap orang memiliki persepsinya sendiri atas suatu kejadian yang mungkin jauh berbeda dengan uraian orang lain (Ikhsan, 2010). Perilaku individu didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan kenyataan itu sendiri. Robbins (2009), mengemukakan bahwa sejumlah faktor beroperasi untuk membentuk dan terkadang mengubah persepsi yang terletak dalam diri pembentuk persepsi maupun dalam konteks situasi di mana persepsi tersebut dibuat.

Fraud (Kecurangan)

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), *fraud* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu agar mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung maupun tidak merugikan pihak lain. ACFE membagi *fraud* (kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu kecurangan Laporan Keuangan, penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*) dan korupsi. Membahas soal *fraud*, juga dikenal *fraud triangle theory* atau teori segitiga yang dikemukakan Cressey (1953) dalam Tuanakota (2010) antara lain tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.

Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018, Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Definisi lain dikemukakan oleh Indra Bastian (2010:263) "Pengadaan barang dan jasa publik yakni perolehan barang, jasa dan pekerjaan publik dengan cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi publik (masyarakat).

Red Flags

Red flags merupakan *early warning system* sehingga dapat meminimalisir risiko tidak terdeteksinya kecurangan oleh auditor. Menurut DiNapoli (2010) *red flag* adalah "a set of circumstances that are unusual in nature or vary from the normal activity" atau keadaan yang tidak biasa terjadi atau variasi dari aktivitas normal. Dalam *Statement of Auditing Standard (SAS)* no.99 telah diungkapkan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan terbebas dari kesalahan material baik yang disebabkan oleh *error* maupun *fraud* serta mempertimbangkan *risk factor* atau yang dikenal dengan *red flags*. Standar ini telah merangkum 42 *risk factor* yang dapat digunakan auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan yang kemudian diadopsi dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Dalam sektor pemerintahan sendiri, BPK merangkum *red flags* dalam pengadaan barang dan jasa yang tertuang dalam *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9/K/IXIII.2/10/2009*. *Red flags* tersebut dapat digunakan oleh auditor pemerintah untuk mendeteksi kecurangan di setiap tahap proses pengadaan dimana terdapat lima kategori *red flags* dalam tersebut dalam Utomo (2014) antara lain barang/jasa hasil pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi, evaluasi penentuan pemenang tidak sesuai dengan ketentuan, proses pengadaan yang tidak transparan, manipulasi ketentuan administrasi, dan permasalahan pada panitia pengadaan.

Efektivitas Red Flags

Freeman dalam Utomo (2014) menyebutkan bahwa efektivitas dapat dilihat dari dua sudut pandang antara lain menekankan pada kemampuan untuk bertahan hidup dan menekankan pada pencapaian tujuan. Dalam penelitian ini lebih mengarah ke sudut

pandangan yang kedua yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan. Utomo (2014) menyimpulkan bahwa *red flags* dianggap efektif apabila digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu mendeteksi adanya *fraud*.

Pengaruh Gender terhadap Persepsi Auditor Internal Mengenai Efektivitas Red Flags

Muchlas (2005) menyatakan gender bisa mempengaruhi seseorang dalam memberikan interpretasi persepsi pada suatu objek. Ini menyiratkan perbedaan jenis kelamin cenderung membentuk persepsi yang tidak sama sehingga mempengaruhi sikap yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan dalam menilai sesuatu. Moyes dan Baker (2009) juga menemukan bahwa gender berpengaruh terhadap persepsi auditor mengenai efektivitas *red flags*. Oleh karena itu, hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

H₁ : Gender berpengaruh positif terhadap persepsi auditor internal pemerintah mengenai efektivitas *red flags*.

Pengaruh Masa Kerja terhadap Persepsi Auditor Internal Mengenai Efektivitas Red Flags

Hasil penelitian Hegazy dan Kassem (2010) dalam Rustiarini (2014) menemukan bahwa ada pengaruh masa kerja terhadap persepsi auditor atas efektivitas *red flags*. Penelitian Moyes dan Hasan (1996) menunjukkan bahwa masa kerja berpengaruh secara signifikan dalam mendeteksi *fraud* dalam suatu siklus audit. Utomo (2014) menyampaikan bahwa auditor yang memiliki masa kerja lebih lama memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik dalam melaksanakan audit agar lebih efektif. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang akan diuji:

H₂ : Masa Kerja berpengaruh positif terhadap persepsi auditor internal pemerintah mengenai efektivitas *red flags*.

Pengaruh Jabatan terhadap Persepsi Auditor Internal Mengenai Efektivitas Red Flags

Elias (2004) menemukan bahwa akuntan publik yang memiliki level jabatan yang tinggi mempunyai pandangan yang lebih baik dalam bekerja dibanding dengan akuntan publik yang berada di level jabatan bawah. Hasil penelitian Agustina (2014) menyebutkan bahwa jenjang jabatan berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Tanggungjawab yang diemban masing-masing jenjang jabatan auditor menuntut auditor untuk memiliki tingkat pemahaman yang tinggi agar dapat diperoleh keyakinan hasil audit yang dilaksanakan. Hal ini akan mempengaruhi persepsi auditor dalam menilai efektivitas *red flags*. Berdasarkan uraian di atas, berikut hipotesis yang akan diteliti:

H₃ : Jabatan berpengaruh positif terhadap persepsi auditor internal pemerintah mengenai efektivitas *red flags*.

Pengaruh Pelatihan/Diklat Fraud terhadap Persepsi Auditor Internal Mengenai Efektivitas Red Flags

Yang *et al.* (2009) dan Moyes dan Baker (2009) menyimpulkan bahwa auditor yang

pernah ikut pelatihan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rustiarini (2014) yang menemukan adanya pengaruh pelatihan tentang kecurangan terhadap persepsi auditor mengenai efektifitas *red flags*. Auditor di instansi pemerintah yang mengikuti pelatihan/diklat tentang fraud tentunya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan karena pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan tersebut memiliki kualitas yang sama baiknya dengan pengetahuan yang didapat dari pengalaman sebelumnya. Selain itu pelatihan tentang fraud akan meningkatkan kepekaan auditor dalam menghadapi munculnya gejala fraud sehingga memiliki kesiapan menyusun prosedur pendeteksian yang tepat. Hipotesis yang diajukan berdasarkan uraian tersebut:

H₄ : Pelatihan/diklat *fraud* berpengaruh positif terhadap persepsi auditor internal pemerintah mengenai efektifitas *red flags*.

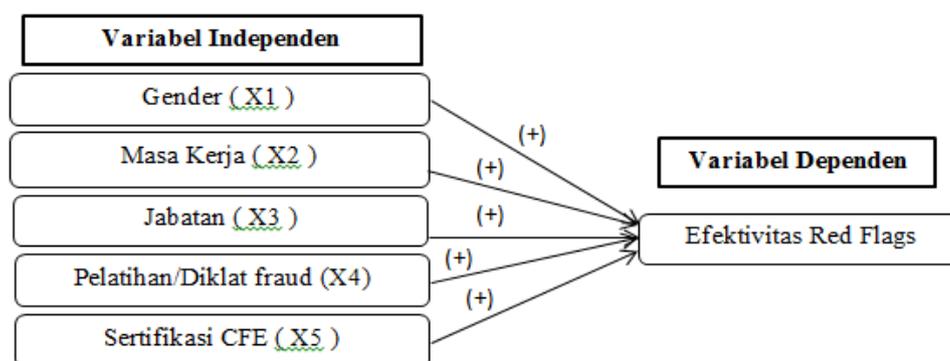
Pengaruh Sertifikasi CFE terhadap Persepsi Auditor Internal mengenai Efektivitas Red Flags

Seseorang yang memperoleh CFE menunjukkan kompetensi dan komitmen profesionalnya (ACFE, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti dan Pamudji (2009) diperoleh hasil bahwa kompetensi mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian Robiyanto (2009) menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara auditor yang bersertifikasi dengan auditor yang belum bersertifikasi mengenai efektifitas metode pendeteksian dan pencegahan tindakan kecurangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Elias (2004) dan Law (2008) dalam Utomo (2014). Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dibangun adalah :

H₅ : Sertifikasi CFE berpengaruh positif terhadap persepsi auditor internal pemerintah mengenai efektifitas *red flags*.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian kuantitatif dengan menggunakan data

primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang berupa kuesioner. Dalam kuesioner yang digunakan bagian pertama terkait informasi demografi responden dan bagian kedua berisi 36 pernyataan tentang red flags dalam pengadaan barang/jasa sesuai Keputusan BPK RI *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9/K/IXIII.2/10/2009* yang diadopsi dari penelitian Utomo (2014).

Populasi dan Sampel Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah auditor internal pemerintah yaitu auditor BPKP deputy investigasi yang berlokasi di kantor pusat BPKP di Jakarta. Populasi penelitian adalah seluruh pejabat fungsional auditor deputy investigasi di kantor BPKP pusat, Jakarta. Metode pengambilan sampel yang digunakan mengacu kepada pendapat Arikunto (2010) yaitu jika populasi penelitian jumlahnya kurang dari 100 maka sampel yang digunakan adalah semuanya. Oleh karena di deputy investigasi BPKP pusat populasinya kurang dari 100 maka dalam peneliti menggunakan populasi menjadi sampelnya.

Pengukuran Variabel

Penelitian ini yang menjadi variabel independen antara lain gender, masa kerja, jabatan, pelatihan/diklat fraud, dan sertifikasi CFE. Gender diproksikan dengan keberadaan auditor wanita dalam penugasan audit, yaitu diberi kode 1 untuk auditor laki-laki, dan kode 2 untuk auditor wanita. Jabatan auditor merupakan jabatan auditor pada kantor BPKP yang dikategorisasi antara lain yaitu diberikan kode 1 untuk auditor pelaksana, kode 2 untuk auditor pelaksana lanjutan, kode 3 untuk auditor penyelia, kode 4 untuk auditor pertama, kode 5 untuk auditor muda, kode 6 untuk auditor madya, dan kode 7 untuk auditor utama. Masa kerja auditor diukur dengan lamanya auditor bekerja, yaitu diberikan kode 1 untuk auditor yang memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun, kode 2 untuk masa kerja 5-10 tahun, dan kode 3 untuk auditor yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Variabel keikutsertaan auditor dalam pelatihan atau diklat tentang kecurangan diberikan kode 1 untuk jawaban Ya dan kode 0 untuk jawaban Tidak. Variabel kepemilikan sertifikasi CFE, diberi kode 1 untuk jawaban yang telah bersertifikasi CFE dan kode 0 untuk jawaban tidak.

Variabel dependen penelitian ini adalah persepsi auditor atas efektivitas *red flags* yang digunakan yang dicantumkan menjadi bagian kedua di dalam kuesioner yang dibagikan. Persepsi terkait dengan bagaimana cara individu memandang fenomena yang terjadi di sekitarnya, sehingga setiap individu dapat memiliki persepsi yang sama ataupun berbeda (Yulifah dan Irianto, 2014). Dalam penelitian ini persepsi tentang tingkat efektivitas red flags diukur dengan menggunakan 36 pernyataan yang diadopsi dari Keputusan BPK RI *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9/K/IXIII.2/10/2009*. Jawaban dari setiap butir pernyataan diukur menggunakan skala Likert untuk mengetahui kecenderungan auditor dalam menilai efektivitas red flags dengan kode 1 "sangat tidak efektif", kode 2 "tidak efektif", kode 3 "kurang efektif", kode 4 "cukup efektif", kode 5 "efektif", dan kode 6 "sangat efektif". Dari 36 pernyataan dalam kuesioner tersebut kemudian dibagi ke dalam 5 kategori yakni kategori pertama *red flags* terkait barang/jasa hasil pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdiri dari 15 item pernyataan, bagian ke dua *red flags* terkait evaluasi penentuan pemenang tidak sesuai dengan ketentuan terdiri dari 9 item pernyataan, bagian ketiga *red flags* terkait proses pengadaan yang tidak transparan yang terdiri dari 4 item pernyataan, bagian ke empat *red flags* terkait manipulasi ketentuan administrasi

terdiri dari 5 item pernyataan, dan bagian ke 5 *red flags* terkait permasalahan pada panitia pengadaan yang terdiri dari 3 item pernyataan.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 20. Sebelumnya dilakukan analisis statistik deskriptif untuk memberi gambaran mengenai persepsi auditor atas efektivitas *red flags* secara keseluruhan. Prosedur analisisnya antara lain: mencari nilai rata-rata untuk tiap item *red flags*, mencari nilai rata-rata keseluruhan item *red flags*, membandingkan nilai rata-rata tiap item dengan nilai rata-rata keseluruhan, membagi persepsi atas tingkat efektivitas *red flags* menjadi tiga kategori yaitu kurang efektif, cukup efektif, dan efektif dengan mengacu pada nilai rata-rata dan menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dapat dilakukan dengan cara, antara lain : (1) Jika nilai rata-rata suatu item *red flags* secara signifikan lebih rendah dari nilai rata-rata keseluruhan, maka item tersebut merupakan kategori *red flags* yang “kurang efektif” dalam mendeteksi kecurangan. (2) Jika nilai rata-rata suatu item *red flags* tidak berbeda secara signifikan dari nilai rata-rata keseluruhan, maka item tersebut merupakan kategori *red flags* yang “cukup efektif” dalam mendeteksi kecurangan. (3) Jika nilai rata-rata suatu item *red flags* secara signifikan lebih tinggi dari nilai rata-rata keseluruhan, maka item tersebut merupakan kategori *red flags* yang “efektif” dalam mendeteksi kecurangan. Pengujian selanjutnya adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis. Model regresi dalam penelitian ini yakni sebagai berikut.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y	= Efektivitas <i>red flags</i>	β_5	= Koefisien regresi parsial sertifikasi CFE
β	= Konstanta	X_1	= gender
β_1	= Koefisien regresi parsial gender	X_2	= masa kerja
β_2	= Koefisien regresi parsial masa kerja	X_3	= jabatan
β_3	= Koefisien regresi parsial jabatan	X_4	= gender
β_4	= Koefisien regresi parsial pelatihan/diklat fraud	X_5	= sertifikasi CFE

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan

Obyek penelitian ini adalah auditor internal pemerintah yaitu auditor BPKP yang berkedudukan di deputy investigasi BPKP pusat di Jakarta. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan secara langsung kuesioner kepada responden sejumlah 85 kuesioner namun yang kembali dan dapat diolah hanya berjumlah 81 kuesioner.

Demografi Responden

Pada tabel berikut dijelaskan data tentang demografi responden, antara lain :

Tabel 1 Demografi Responden

Karakteristik	Persentase	Karakteristik	Persentase
1. Gender		4. Jabatan auditor	
a. Laki-laki	67.9%	a. Pelaksana	14.8%
b. Perempuan	32.1%	b. Pelaksana lanjutan	1.2%
2. Masa Kerja		c. Penyelia	7.4%
a. < 5 tahun	23.5%	d. Pertama	25.9%
b. 5-10 tahun	17.3%	e. Muda	27.2%
c. > 10 tahun	59.3%	f. Madya	23.5%
3. Pelatihan/diklat fraud		5. Sertifikasi CFE	
a. Ya	86.4%	a. Ya	7.4%
b. Tidak	13.6%	b. Tidak	92.6%

Sumber : Data diolah (2018)

Hasil Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini hanya digunakan pada variabel dependen (efektivitas *red flags*) sedangkan pada variabel independen tidak diuji validitas dikarenakan pengukurannya menggunakan kuesioner yang bersifat subyektif atau berdasar kepada demografi responden sendiri sehingga tidak membutuhkan uji validitas dan reliabilitas. Suatu instrumen dikatakan valid bila nilai r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel (Ghozali, 2012). Nilai r-hitung didapatkan setelah pengolahan menggunakan SPSS, sedangkan nilai r-tabel dari nilai tabel dengan *degree of freedom* = $n-2$ (81) dan taraf signifikansi sebesar 5%, yaitu 0,221. Adapun hasil uji validitas tersebut diketahui seluruh item pernyataan dalam variabel dependen (efektivitas *red flags*) sudah valid dan layak untuk dilakukan pengujian lebih lanjut karena mempunyai nilai r-hitung > r-tabel dengan nilai sig < 0,05.

Hasil Uji Reliabilitas

Data dapat dikatakan reliabel atau konsisten jika *Cronbach's Alpha* > 0,6 (Ghozali, 2012). Setelah instrumen pengukuran dikatakan valid, maka instrumen tersebut harus diuji tingkat konsistensi pengukurannya dengan menggunakan nilai *Alpha Cronbach*. Seluruh pernyataan dalam masing-masing variabel tingkat konsistensinya sudah baik ketika mengukur variabel efektivitas *red flags* karena mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* telah melebihi 0,60. Hasilnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Pengukuran	Keterangan
1.	Efektivitas <i>Red Flags</i>	0,930	Reliabel

Sumber : Data diolah (2018)

Untuk mengetahui apakah residual dari model regresi berdistribusi normal atau tidak dilakukan pengujian normalitas menggunakan nilai Asymp. Sig Kolmogorov-

Smirnov dengan signifikansi $> 0,05$ dikatakan normal, sedangkan jika $< 0,05$ tidak normal (Ghozali, 2012). Hasil uji ini nilai signifikansinya adalah $0.543 > 0,05$ yang artinya interpretasi datanya adalah normal. Variabel bebas dikatakan tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan variabel bebas lain jika memiliki nilai VIF < 10 atau *tolerance* $> 0,10$. Untuk menguji hal tersebut dilakukan uji multikolinearitas yang hasilnya adalah masing-masing variabel bebas bersifat independen satu dengan yang lain. Hal tersebut dapat dibuktikan dari nilai VIF masing-masing variabel bebasnya adalah < 10 dengan nilai *tolerance* lebih besar dari $0,10$. Untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi kesamaan atau ketidaksamaan residual antar pengamatan digunakan uji Glejser, dengan cara meregresikan variabel independen terhadap residualnya. Hasil uji menunjukkan bahwa data pada penelitian ini bersifat homoskedastisitas karena nilai sig untuk semua variabel > 0.05 .

Pengujian Tingkat Efektivitas *Red Flags*

Untuk mengetahui persepsi auditor internal pemerintah mengenai efektivitas *red flags*, akan dilihat nilai rata-rata pada masing-masing item *red flags* yang kemudian dibandingkan dengan nilai rata-rata keseluruhan. Jika nilai rata-rata suatu item *red flags* secara signifikan lebih tinggi dari nilai rata-rata keseluruhan, maka item tersebut merupakan kategori *red flags* yang "efektif". Jika nilai rata-rata suatu item *red flags* tidak berbeda secara signifikan dari nilai rata-rata keseluruhan, maka item tersebut merupakan kategori *red flags* yang "cukup efektif" dalam mendeteksi kecurangan dan jika nilai rata-rata suatu item *red flags* secara signifikan lebih rendah dari nilai rata-rata keseluruhan, maka item tersebut merupakan kategori *red flags* yang "kurang efektif". Dari hasil tabulasi diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3.58. Dari 36 item *red flags* yang diuji, terdapat 20 item *red flags* yang dipersepsikan efektif, kategori cukup efektif terdiri dari 6 item, dan kategori kurang efektif terdiri dari 10 item. Adapun item *red flags* yang dipersepsikan paling efektif adalah "Volume dan kualitas barang/jasa tidak sesuai spesifikasi teknis".

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yang hasilnya tertera berikut:

Tabel 3 Uji Hipotesis Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.933	5	.987	9.443	.000 ^b
	Residual	7.836	75	.104		
	Total	12.769	80			
a. Dependent Variable: Total_Efektivitas						
b. Predictors: (Constant), Sertifikasi_CFE, Gender, Jabatan, Masa_Kerja, Pelatihan_Fraud						

Sumber : Data diolah (2018)

Terlihat bahwa nilai sig pada uji F di atas adalah $0,000 < 0,05$. Nilai F-hitung adalah 9,44 sedangkan nilai F-tabel pada penelitian ini adalah 2,34 sehingga nilai F-

hitung > F-tabel. Hasil ini memperlihatkan bahwa secara simultan variabel gender, masa kerja, jabatan, pelatihan *fraud*, dan sertifikasi CFE berpengaruh signifikan terhadap efektivitas *red flags*.

Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh dari variabel independen. Hasil pengujiannya terdapat sebagai berikut:

Tabel 4 Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.622 ^a	.386	.345	.32323
a. Predictors: (Constant), Sertifikasi_CFE, Gender, Jabatan, Masa_Kerja, Pelatihan_Fraud				
b. Dependent Variable: Total_Efektivitas				

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas diketahui pengaruh gender, masa kerja, jabatan, pernah mengikuti pelatihan atau diklat mengenai *fraud*, serta kepemilikan sertifikat CFE terhadap efektivitas *red flags* adalah sebesar 0,386 atau 38,6%, sedangkan sisanya sebesar 61,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Tabel 5 Uji Hipotesis Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.299	.203		16.270	.000
	Gender	-.120	.079	-.141	-1.527	.131
	Masa_Kerja	-.026	.044	-.054	-.584	.561
	Jabatan	-.003	.023	-.011	-.124	.902
	Pelatihan_Fraud	.561	.109	.484	5.160	.000
	Sertifikasi_CFE	.327	.109	.278	2.999	.004

Sumber : Data diolah (2018)

Dari tabel di atas dapat disusun persamaan regresi :

$$Y = 3.299 - 0.120X_1 - 0.026 X_2 - 0.003 X_3 + 0.561 X_4 + 0.327 X_5 + e$$

Dari persamaan regresi tersebut terdapat nilai konstanta sebesar 3.299 yang

menunjukkan apabila semua variabel independen bernilai 0 maka variabel dependen akan bernilai sebesar 3.299, sedangkan nilai koefisien (β) adalah sebesar -0.120; -0.026; -0.003; 0.561; dan 0.327, menunjukkan besarnya perubahan variabel dependen apabila variabel independen berubah sebesar satu satuan.

Hasil Uji Statistik t

Dari tabel 5 di atas diketahui bahwa nilai signifikansi variabel gender (X1) adalah sebesar 0,131 atau lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yakni 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel gender (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas *red flags*. Nilai signifikansi variabel masa kerja (X2) adalah sebesar 0,561 atau lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yakni 0,05 sehingga disimpulkan bahwa variabel masa kerja (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas *red flags*. Adapun variabel jabatan (X3) adalah sebesar 0,902 atau lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yakni 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel jabatan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi auditor mengenai efektifitas *red flags* (Y). Selanjutnya nilai signifikansi variabel pelatihan (X4) adalah sebesar 0,00 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yakni 0,05 yang artinya variabel pelatihan/diklat (X4) berpengaruh signifikan terhadap persepsi auditor mengenai efektifitas *red flags*. Nilai signifikansi variabel sertifikasi CFE (X5) adalah sebesar 0,00 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yakni 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel sertifikasi CFE (X5) berpengaruh signifikan terhadap persepsi auditor mengenai efektifitas *red flags* (Y).

Pengaruh Gender terhadap Persepsi Auditor Internal Mengenai Efektivitas Red Flags

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap persepsi auditor internal dalam menilai efektifitas *red flags*. Kesetaraan peran serta tanggungjawab dalam setiap penugasan audit mengakibatkan timbulnya persepsi yang sama dalam menilai *red flags* mana yang efektif digunakan dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang/jasa. Tidak berpengaruhnya gender terhadap persepsi auditor mengenai efektifitas *red flags* karena dalam penilaian tersebut lebih dominan didasari oleh kompetensi auditor itu sendiri ataupun pengalaman dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang/jasa. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Rustiarini (2014) dan Smith et al (2005) yang menemukan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap persepsi auditor mengenai efektifitas *red flags*.

Pengaruh Masa Kerja terhadap Persepsi Auditor Internal Mengenai Efektivitas Red Flags

Hasil penelitian ini menemukan masa kerja tidak berpengaruh terhadap persepsi auditor internal dalam menilai efektifitas *red flags*. Hasil ini mendukung penelitian Smith et al (2005), Utomo (2014) dan Rustiarini (2014). Setiap auditor pada saat melaksanakan tugas dituntut untuk memahami standar auditing serta pedoman audit. Lama atau tidaknya masa kerja tidak membedakan tuntutan terhadap mereka untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tanggungjawab. Ini berarti mengharuskan semua auditor mempunyai pemahaman yang baik tentang *red flags* dalam mendeteksi kecurangan. Hal tersebut kemudian menimbulkan persepsi yang sama dari auditor dalam menilai efektifitas *red flags*.

Pengaruh Jabatan terhadap Persepsi Auditor Internal Mengenai

Efektivitas *Red Flags*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jabatan tidak berpengaruh terhadap persepsi auditor internal dalam menilai efektifitas *red flag*. Hal ini dapat diartikan bahwa apapun jabatan auditor baik itu auditor junior seperti auditor pelaksana maupun auditor senior seperti auditor madya memiliki pemahaman yang sama dalam menilai potensi fraud pengadaan barang/jasa. Apapun jabatan auditor semuanya dituntut untuk memiliki pemahaman dan wawasan dalam mendeteksi kecurangan. Auditor junior seperti auditor pelaksana lebih sering turun ke lapangan serta melihat secara rinci kondisi di lapangan sehingga perlu memahami indikator kecurangan begitupun dengan auditor seniornya yang tentu saja harus mengetahui *red flags* yang patut digunakan sehingga dapat menuntun juniornya dan untuk menginvestigasi lebih lanjut apabila ada penyimpangan. Hasil ini mendukung penelitian Moyes dan Baker (2009), Utomo (2014) dan Rustiarini (2014) yang menyimpulkan bahwa jabatan tidak berpengaruh terhadap persepsi auditor internal dalam menilai efektifitas *red flags*.

Pengaruh Pelatihan/Diklat Fraud terhadap Persepsi Auditor Internal Mengenai Efektivitas *Red Flags*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan fraud berpengaruh positif terhadap persepsi auditor internal dalam menilai efektifitas *red flags*. Di BPKP ada berbagai jenis pelatihan maupun diklat yang diikuti auditor terkait fraud misalnya pelatihan "*Developing Fraud Risk Management Capability*", diklat "*Data Analytic, Fraud Investigation, and Forensic Auditing*", diklat *Fraud Control Plan*, pelatihan bersama penyidik KPK, dll. Keikutsertaan auditor dalam pelatihan tersebut tentunya akan meningkatkan pengetahuan dan kepekaan dalam melihat tanda-tanda kecurangan. Dalam berbagai pelatihan tersebut auditor dilatih untuk memiliki kesiapan menciptakan prosedur pendeteksian yang tepat sehingga dapat memfokuskan penaksiran resiko fraud. Hal ini memberi gambaran bahwa auditor yang pernah mengikuti pelatihan ataupun diklat tentang fraud tentu memiliki pemahaman yang berbeda dalam menilai efektifitas *red flags* dibanding dengan yang belum mengikuti pelatihan/diklat fraud. Hasil ini mendukung hasil penelitian Moyes dan Baker (2009) dan Rustiarini (2014) bahwa terdapat pengaruh pelatihan fraud terhadap persepsi auditor internal dalam menilai efektifitas *red flags*.

Pengaruh Sertifikasi CFE terhadap Persepsi Auditor Internal Mengenai Efektivitas *Red Flags*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi CFE berpengaruh positif terhadap persepsi auditor internal dalam menilai efektifitas *red flags*. Pemegang sertifikasi CFE merupakan suatu pembuktian adanya pengetahuan dan pengalaman seseorang yang profesional dalam bidang anti-fraud karena CFE sendiri merepresentasikan standar tertinggi yang dimiliki oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Auditor pemegang sertifikat CFE menunjukkan kompetensi serta komitmen profesionalnya di bidang pendeteksian fraud. Ini memberi gambaran bahwa auditor yang telah bersertifikasi CFE memiliki pemahaman maupun persepsi yang berbeda dalam menilai efektifitas *red flags* dibanding dengan yang belum bersertifikasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Elias (2004) dan Law (2008) dalam Utomo (2014).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan menguji faktor-faktor demografis auditor terhadap persepsi auditor mengenai efektivitas *red flags* pengadaan barang dan jasa serta mengidentifikasi persepsi auditor internal pemerintah atas efektivitas *red flags* tersebut. Adapun hasil pengujian menunjukkan bahwa gender, masa kerja, dan jabatan tidak berpengaruh terhadap persepsi auditor mengenai efektivitas *red flags* sedangkan pelatihan/diklat fraud dan sertifikasi CFE berpengaruh. Adapun "Volume dan kualitas barang/jasa tidak sesuai spesifikasi teknis" dipersepsikan sebagai *red flags* yang paling efektif dalam mendeteksi kecurangan pengadaan barang/jasa.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat memperluas wilayah penelitian ataupun menambah objek penelitian seperti auditor pada inspektorat kementerian/lembaga sehingga hasilnya lebih dapat digeneralisasi dan juga melakukan wawancara mendalam dengan responden. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain di luar penelitian penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Fanni. 2014. *Pengaruh Pengalaman Kerja, Gender, Jenjang Jabatan, Kesadaran Etis, dan Independensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud)*. Other thesis, Prodi Akuntansi Unika Soegijapranata.
- AICPA, SAS No.99. 2002. *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*. New York: AICPA
- Alwi, Syafaruddin. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Keunggulan Kompetitif*. Yogyakarta : BPFE.
- Analisa Publik. 2018. Modus Korupsi Pengadaan, Sebelum dan Sesudah Perpres 54/2010 <http://analispublik.com/2018/02/17/modus-korupsi-pengadaan-sebelum-dan-sesudah-perpres-542010/> (Diakses tanggal 25 Mei 2018)
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Association of Certified Fraud Examiner (ACFE). 2012. *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- BPK. 2011. Opini WTP Tidak Menjamin Tidak Ada Korupsi. <http://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-tidak-menjamin-tidak-ada-korupsi> . (Diakses tanggal 9 April 2018)
- DiNapoli, Thomas P. 2008. *Red Flags for Fraud*. State of New York Office of the State Comptroller. New York.
- Ghozali, I. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS Edisi Enam*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Hegazy, M.A.E.A. dan R. Kassem. 2010. "Fraudulent Financial Reporting Do Red Flags Really Help?". *Journal of Economics and Engineering*. Vol. 1, No. 4, hlm 69-79
- ICW. 2017. *Kajian Tren Penanganan Kasus Korupsi Tahun 2016*. https://antikorupsi.org/sites/default/files/tren_korupsi_2017.pdf.(Diakses tanggal 8 April 2018)
- Ikhsan, Arfa dan Muhammad Ishak. 2010. *Akuntansi Keprilakuan*. Salemba Empat: Jakarta

- Kassem, R. dan A. Higson. 2012. "The New Fraud Triangle Model". *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, Vol. 3, No. 3, hlm 191-195.
- KPK. 2014. *Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/litbang/kajian-pencegahan-korupsi-pada-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah> (Diakses tanggal 2 Juni 2018) Keuangan. Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi. Vol.5.No.1
- Moyes, G.D. dan C. R. Baker. 2009. "Factors Influencing The Use of Red Flags to Detect Fraudulent Financial Reporting", *Internal Auditing*, Vol. 24, No. 3, hlm 33-40.
- Moyes, G.D., P. Lin, R.M. Landry, dan H. Vicdan. 2006. "Red Flags Detecting Fraud". *Journal of Accounting, Ethics & Public Policy*, Vol. 6, No. 1, hlm 1-28.
- Makmuri, Muchlas. 2005. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Pradano, Tibiko Zabar. 2018. *Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*. <https://indonesiana.tempco.co/read/124941/2018/04/03/biko/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa> (Diakses tanggal 13 Mei 2018)
- Rahman, Kartika Aisyah. 2015. *Penggunaan Metode Red Flags Untuk Mendeteksi Kecurangan Dalam Perusahaan*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Robbins, Stephen P dan Timothy A. Judge. 2009. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robiyanto, Febra. 2009. *Persepsi Auditor Mengenai Metode Pendeteksi dan Pencegah Tindakan Kecurangan Pada Industri Perbankan*. Skripsi: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Rustiarini, N.W dan Ni Luh Gde Novitasari. 2014. Persepsi Auditor Atas Tingkat Efektivitas *Red Flags* Untuk Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Volume 5 Nomor 3. Halaman 345-510. pISSN 2086-7603, eISSN 2089-5879.
- Siaran Pers. 2011. *Opini WTP Tidak Menjamin Tidak Ada Korupsi*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Simanjuntak, Payman J. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Smith, M., N.H. Omar, S.I.Z.S. Idris dan I. Baharuddin. 2005. "Auditors' Perception of Fraud Risk Indicators: Malaysian Evidence". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 20, No. 1, hlm 73-85
- Tuanakotta, Theodorus M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Salemba Empat. Jakarta
- Utomo, Setio Agung. 2014. *Persepsi Auditor Eksternal Pemerintah Terhadap Efektivitas Red Flags Dalam Mendeteksi Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa*. Tesis. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Widyastuti, M., dan Pamudji, S. 2009, "Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan", *Jurnal Value Added*, Vol. V, No. 2, hal. 52-73.
- Yang, W., G.D. Moyes, H. Hamedian, dan A. Rahdarian. 2009. "Professional Demographic Factors that Influence Iranian Auditors Perceptions of The Fraud Detecting Effectiveness of Red Flags". *International Business and Economics Research Journal*, Vol. 9, No. 1, hlm 83102.
- Yulifah, A. dan G. Irianto. 2014. "Persepsi Auditor Eksternal tentang Determinan

Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*
Universitas Brawijaya, Vol. 2, No. 2

_____. 2018. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah